

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Atmasasmita. R. 2013. *Buku I Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Hery. 2019. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta :Grasindo
- Herimulyanto, A. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulyadi, L. 2020. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram- NTB: Mataram University Press
- Nirwanto, A., 2013. *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka ilmu.
- Nursya ,A . 2020. *Beberapa Bentuk PerbuatanPelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: CV Alungadan Mandiri
- Peter Mahmud Marzuki. 2010.*Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Widijowati, D. 2024. *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Widyo, P. 2016. *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Prespektif Jaksa dan Guru Besar*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Yusni, M. 2019. *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 568).

C. JURNAL

Amanda, B. 2021., “*Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 5, No. 4. Hal 569-576.

- Bethari, B & Eko, W., 2021., "*Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online*", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1. Hal. 77-91. DOI: <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.528>
- David, T., 2021., "*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, Hal. 2463-2478.
- Dimiyati A., 2021., "*Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan*". *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. Vol. 11, No. 1. Hal. 40-55. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v11i1.1915>
- Kristanto, D., dkk. 2023., "*Penerapan Delik Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Tindak Pidana Perbankan di Indonesia*". *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 1. Hal 178-195.
- Mufti, R., & Eko, W. 2021., "*Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Dengan Pelaku Yang Melarikan Diri*", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 1. Hal. 92-99. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.96>
- Piri, A., dkk. 2023., "*Eksistensi Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Perkara-Perkara Pidana di Bidang Perbankan Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*". *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 4. Hal. 658-669.
- Prasetyo, D., 2016., "*Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12, No. 24. Hal. 149-162.

Yuliasuti, E., 2020., "*Problematika yang Dihadapi Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*". Jurnal Syariah, Vol. 1, No. 1. Hal. 160-164

D. Lain-Lain

Choiruddin Afriananto Soesetyo selaku staff administrasi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, *Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi Bank BUMD*. Wawancara Pribadi pada tanggal 25 Oktober 2024.

Bapak Garuda Cakti Viratama, S.H., *Kendala dan Upaya penyitaan aset di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang*, Wawancara Pribadi Tanggal 29 April 2025 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Bapak Fikri Fawaid. S.H., *Kronologi Kasus Tindak Pidana Korupsi Bank BUMD Atas Nama Tersangka MR*, Wawancara Pribadi Tanggal 30 April 2025 di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.